

---

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAMPUNG WISATA**

**Rita Rahmawati**

*rita.rahmawati@unida.ac.id*

**Hidayat**

*hidayatfarhan99@gmail.com*

**Rusliandy**

*rusliandy1980@gmail.com*

**Universitas Djuanda Bogor**

### **ABSTRACT**

*Hidayat, D. 2221115. Master's Program in Public Administration, Graduate School, Djuanda University, Bogor, 2024. Implementation of the Tourism Village Policy in Bogor City. Supervisor I: Dr. Hj. Rita Rahmawati, Dra., M. Si.; Supervisor II: Dr. Rusliandy, S.STP., ME., M.Sc. Tourism Villages are one of the efforts to develop community-based tourism. Various types of tourism are offered by each region, but they are still faced with various challenges. This research aims to describe the implementation of the Tourism Village Policy in Bogor City, which is managed by the Tourism Mobilization Group (Kompepar) with direct supervision from the Bogor City Tourism and Culture Office. This research is qualitative research with a field study approach. Research informants using a purposive sampling technique consisted of officials from the Bogor City Tourism and Culture Office, Mulyaharja Village Head, Babakan Pasar Village Head, Cibuluh Village Head, Sindangsari Village Head, Situgede Village Head, Rancamaya Village Head, Tourism Mobilization Group (Kompepar) and the community around the Tourism Village. Data collection techniques consist of observation, interviews and documentation. Data analysis follows the Van Meter and Van Horn analysis steps of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on Van Meter and Van Horn's theory regarding the implementation of public policy, it was found that the implementation of tourist village policies showed a positive impact on the economic and social life of the tourist village community, although it was still uneven and lacked resource support. The Bogor City Tourism and Culture Office is trying to optimize implementation by involving various parties, but policy outreach still needs to be improved. In terms of the implementation environment, there is a strong commitment from implementers and regulatory support from local governments. In general, the commitment and response of implementers in managing tourist villages is good, but there is still a need for increased coordination and better policy arrangement from local governments to improve the quality of tourist villages.*

---

**Keywords:** *Policy Implementation, Tourism Village, Bogor City.*

### **ABSTRAK**

Hidayat, D.2221115. Program Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor, 2024. Implementasi Kebijakan Kampung Wisata di Kota Bogor. Pembimbing I: Dr. Hj. Rita Rahmawati, Dra., M. Si.; Pembimbing II: Dr. Rusliandy, S.STP., ME., M.Si. Kampung Wisata merupakan salah satu upaya pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat. Berbagai jenis pariwisata ditawarkan oleh setiap daerah, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Implementasi Kebijakan Kampung Wisata di Kota Bogor yang pelaksanaan pengelolaannya oleh Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) dengan pengawasan langsung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling terdiri dari Pejabat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, Lurah Mulyaharja, Lurah Babakan Pasar, Lurah Cibuluh, Lurah Sindangsari, Lurah Situgede, Lurah Rancamaya, Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) dan masyarakat di sekitar Kampung Wisata. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti langkah-langkah analisis Van Meter dan Van Horn dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn tentang implementasi kebijakan publik, ditemukan bahwa implementasi kebijakan kampung wisata menunjukkan dampak yang positif terhadap kehidupan ekonomi maupun sosial masyarakat kampung wisata, meskipun masih belum merata dan kurangnya dukungan sumber daya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor berusaha mengoptimalkan implementasi dengan melibatkan berbagai pihak, tetapi sosialisasi kebijakan masih perlu ditingkatkan. Dari segi lingkungan implementasi, terdapat komitmen yang kuat dari pelaksana dan dukungan regulasi dari pemerintah daerah. Secara umum, komitmen dan respon pelaksana dalam pengelolaan kampung wisata sudah baik, tetapi masih diperlukan peningkatan koordinasi dan penataan kebijakan yang lebih baik dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dari pada kampung wisata.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Kampung Wisata, Kota Bogor.

## **PENDAHULUAN**

Industri pariwisata memiliki dampak ekonomi yang signifikan di banyak negara di seluruh dunia. Ini mencakup sektor seperti akomodasi, transportasi, restoran, hiburan, dan jasa lainnya yang mendukung wisatawan selama perjalanan mereka. Selain itu, pariwisata juga berkontribusi pada pelestarian warisan budaya dan alam, serta mempromosikan pertukaran budaya antara orang-orang dari berbagai latar belakang.

Pariwisata dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk pariwisata budaya, pariwisata alam, pariwisata sejarah, pariwisata petualangan, pariwisata religius, dan pariwisata olahraga. Setiap jenis pariwisata menawarkan pengalaman yang unik dan menarik bagi pengunjung.

Namun, perlu diingat bahwa industri pariwisata juga dapat memiliki dampak negatif. Peningkatan jumlah wisatawan dapat memberikan tekanan pada lingkungan alam dan budaya lokal. Misalnya, adanya kerusakan lingkungan, kerusakan warisan budaya, atau masalah sosial seperti peningkatan harga atau masalah kesejahteraan masyarakat lokal.

Oleh sebab itu, menjaga keseimbangan sangat penting antara pengembangan pariwisata dan perlindungan lingkungan serta

kepentingan masyarakat lokal. Pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab melibatkan pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, penghargaan terhadap warisan budaya, dan manfaat yang adil bagi masyarakat setempat.

Namun sejak terjadinya Covid-19 yang melanda seluruh dunia, industri pariwisata sangat menurun drastis yang berakibat penurunan pendapatan semua negara dari sector pariwisata, tak terkecuali Indonesia. Dengan adanya penurunan pendapatan dari sektor pariwisata, beberapa daerah di Indonesia berusaha membuat strategi membangun kembali pariwisata. Salah satu upaya untuk memulihkan pariwisata di Kota Bogor telah dikeluarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor : 556/Kep.97-Disparbud/2022 tentang Penetapan Kampung Wisata di Kota Bogor yang mengacu pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2025.

Keputusan Wali Kota Bogor tersebut merupakan penetapan Kampung Wisata Kota Bogor, yang terdiri dari :

1. Kampung Ciharashas Mulyaharja, yang berlokasi di Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan.

2. Kampung Labirin, yang berlokasi di Kelurahan Babakan Pasar Kecamatan Bogor Tengah.
3. Kampung Pulo Geulis, yang berlokasi di Kelurahan Babakan Pasar Kecamatan Bogor Tengah.
4. Kampung Batik Cibuluh, yang berlokasi di Kelurahan Cibuluh Kecamatan Bogor Utara.
5. Kampung Perca, yang berlokasi di Kelurahan Sindangsari Kecamatan Bogor Timur.
6. Kampung Situ Gede, yang berlokasi di Kelurahan Situ Gede Kecamatan Bogor Barat.
7. Kampung Durian Rancamaya, yang berlokasi di Kelurahan Rancamaya Kecamatan Bogor Selatan.

Kampung wisata adalah integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang selaras dengan tata cara dan tradisi setempat (Jamil and Nugroho 2023).

Pada tahapan implementasinya, kampung wisata masih mengalami beberapa kendala fasilitas pendukung yang diperlukan. Keterlibatan semua stakeholder dalam pelaksanaan implementasi kampung wisata sangat diperlukan. Hal ini yang akan mempengaruhi proses pelaksanaan pengelolaan kampung wisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan

kampung wisata di Kota Bogor diterapkan dan dampak ekonomi maupun sosial dari kebijakan kampung wisata bagi masyarakat sekitar.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi lapangan di Kampung Wisata Ciharashas Kelurahan Mulyaharja, Kampung Wisata Perca Kelurahan Sindangsari, Kampung Wisata Batik Kelurahan Cibuluh, Kampung Wisata Labirin Kelurahan Babakan Pasar, Kampung Wisata Situgede Kelurahan Situgede dan Kampung Wisata Durian Rancamaya Kelurahan Rancamaya.

Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada fenomena atau gejala yang alami. Penelitian ini bersifat mendalam dan naturalis, serta tidak dapat dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Karena itu, penelitian ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry* atau *field study*. (Abdussamad 2021).

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data di lingkungan alami dengan menggunakan metode ilmiah, yang dilakukan oleh peneliti yang tertarik pada fenomena alamiah (Barlian 2016).

Sumber data adalah subjek dan objek yang digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian. Menurut Lonfand dan Lonfand dalam buku

Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sementara data tambahan termasuk dokumen dan lainnya. Amirin berpendapat bahwa berdasarkan derajat sumbernya, data dibagi menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang mencakup data primer dan data sekunder (Pramono 2020).

Informan penelitian berjumlah 19 orang yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Wawancara untuk penelitian ini dilakukan kepada Pejabat fungsional Aditama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Koordinator di Bidang Desnitasi Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 6 orang Lurah, 6 orang Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) dan 6 orang masyarakat di sekitar lokasi Kampung Wisata.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan adalah proses mengubah kebijakan yang telah dibuat menjadi tindakan nyata di lapangan. Proses ini melibatkan beberapa langkah yang harus dilakukan oleh berbagai pihak terkait agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan kerja sama, komunikasi yang baik, dan

pemantauan yang ketat untuk memastikan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan.

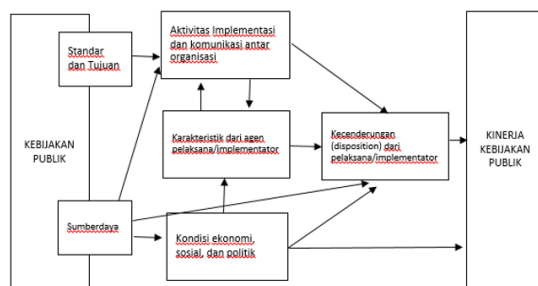
Secara umum, istilah "kebijakan" atau "policy" digunakan untuk merujuk pada tindakan seorang aktor (seperti pejabat, kelompok, atau lembaga pemerintah) dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Satispi and Mufidayaiti 2019).

Implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam proses kebijakan publik. Agar program kebijakan memberikan dampak yang diinginkan, program tersebut harus diimplementasikan. Ada beberapa literatur terbaik yang membahas aspek teoretis dan konseptual implementasi kebijakan (Kasmad 2019).

Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan, perlu menetapkan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya adalah penilaian atas tingkat pencapaian standar dan sasaran tersebut (Situmorang 2016).

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan, perlu untuk menegaskan standar dan sasaran yang harus dicapai oleh para pelaksana. Kejelasan standar dan sasaran saja tidak akan menjamin implementasi

yang efektif jika tidak ada komunikasi antar organisasi dan kegiatan penyuluhan (Luthfie 2021). Hal ini berkaitan erat dengan struktur birokrasi dari pelaksana. Gambarannya adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Policy Implementation Process

Menurut Meter dan Horn ada enam variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran adalah apa yang menjadi tujuan program atau kebijakan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kejelasan sasaran kebijakan harus dapat diukur secara spesifik sehingga pada akhir program dapat dinilai keberhasilan atau kegagalannya.
2. Sumberdaya. Sumberdaya berkaitan dengan ketersediaan atau dukungan berbagai sumber untuk pelaksanaan kebijakan,

- baik sumberdaya finansial maupun sumberdaya manusia.
3. Komunikasi antar organisasi. Berkaitan dengan hal yang menunjukkan pada mekanisme dan prosedur yang disusun untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi antar institusi merupakan hal pokok yang menuntut adanya komitmen untuk saling mendukung antar stakeholder terkait dengan kebijakan.
4. Kondisi sosial, ekonomi dan politik. Lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
5. Karakteristik para pelaksana. Yakni seberapa besar daya dukung struktur organisasi dan nilai-nilai yang berkembang.
6. Sikap pelaksana. Sikap dari para pelaksana juga dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sikap yang baik, disiplin dan ramah adalah diantara sikap yang dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan (Luthfie 2021).

Implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Keputusan Wali Kota Bogor Nomor : 556/Kep.97-Disparbud/2022 tentang Penetapan Kampung Wisata di Kota

Bogor. Keputusan tersebut digunakan sebagai landasan hukum program kampung wisata yang merupakan salah program janji kampanye Wali Kota Bogor. Program Kampung Wisata dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggali potensi pariwisata di wilayahnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat sekitar.

Setelah melakukan penelitian di lapangan, Implementasi kebijakan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor : 556/Kep.97-Disparbud/2022 tentang Penetapan Kampung Wisata di Kota Bogor menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan 6 variabel hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Standar dan Tujuan Organisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn variabel Standar dan Tujuan Organisasi menunjukkan peranan penting bahwa Standar dan sasaran kebijakan harus jelas, sehingga dapat direalisasikan. Bila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi (Nurmayana Siregar 2022). Maka dari itu keberhasilan pelaksanaan kebijakan memerlukan Standar dan Tujuan organisasi yang baik dengan harapan pelaksanaan kebijakan itu sendiri tepat sasaran sesuai perencanaan.

Dari hasil wawancara tersebut, semua pihak dapat mengetahui tujuan dari Kampung Wisata dan mendukung pelaksanaan kebijakan Implementasi Kebijakan Kampung Wisata di Kota Bogor. Kebijakan implementasi kampung wisata didasari oleh dua kepentingan sebagai berikut:

1. Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat yang akan memberikan dampak ekonomi melalui peningkatan pendapatan masyarakat yang akhirnya dapat membantu meningkatkan kesejahterannya.
2. Peningkatan kunjungan wisata, baik domestik maupun mancanegara, yang dapat berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa yang akan datang, walaupun saat ini Kampung Wisata belum memberikan peningkatan PAD di Kota Bogor.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Pejabat fungsional Aditama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Koordinator di Bidang Desnitas Wisata Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, Bapak Nugraha Hidayatulloh, S.STP yang mengatakan bahwa:

*“Dalam pendirian sebuah Kampung Wisata harus memiliki potensi atraksi wisata/daya tarik wisata (baik atraksi alam atau buatan) yang memiliki keunikan, keindahan, nilai keanekaragaman alam/budaya, dan setidaknya terdapat kelompok masyarakat yang peduli dengan potensi kepariwisataan tersebut. Selain itu perlu tujuan yang jelas, Tujuan didirikannya Kampung Wisata di Kota Bogor Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan. Setelah standar pendirian dan tujuan yang jelas, perlu pedoman untuk implementasinya. Beberapa pedoman dalam kebijakan Kampung Wisata di Kota Bogor yaitu:*

- 1. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*
- 2. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata*
- 3. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata*
- 4. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 114 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Provinsi Daerah Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata*
- 5. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2016 tentang*

*Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2025*

- 6. Kebijakan Pemerintah Kota Bogor dengan dikeluarkannya Keputusan Walikota Bogor Nomor 556/Kep.97-Disparbud/2022 tentang Penetapan Kampung Wisata di Kota Bogor. (22 November 2023)*

## **2. Sumberdaya**

Indikator kedua dari isi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah sumber daya. Mereka menegaskan bahwa sumber daya kebijakan sama pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya ini harus tersedia untuk mempermudah pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya kebijakan terdiri dari dana atau insentif lain yang mendukung implementasi kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan dapat berkontribusi besar terhadap kegagalan pelaksanaannya.

Dalam implementasi Kebijakan Kampung Wisata di Kota Bogor variabel sumberdaya menjadi salah satu komponen yang mempengaruhi keberhasilan. Terdapat empat indikator yang dapat mengukur keberhasilan dari variabel sumberdaya yaitu: staf, wewenang, informasi dan fasilitas.

### **a. Staf**



Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah manusia. Kegagalan yang sering terjadi dalam pelaksanaan kebijakan kerap kali disebabkan oleh kurangnya, ketidakmemadaian, dan kurang kompetennya sumber daya manusia di bidang yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sumberdaya staf belum memadai. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pejabat fungsional Aditama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Koordinator di Bidang Desnitasi Wisata Kantor Dinas Pariwisata Kota Bogor, Bapak Nugraha Hidayatulloh, S.STP beliau mengatakan :

*"Jumlah staf dalam pelaksanaan kebijakan Kampung Wisata belum memadai".*

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, jumlah staf yang ada di tempat masih minim, dengan minimnya sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.

**b. Informasi**

Informasi merupakan suatu media penting yang menghubungkan pengetahuan tentang cara melaksanakan. Berdasarkan hasil

wawancara bahwa Informasi Kebijakan Kampung Wisata Kota Bogor sudah difahami selururuhnya oleh masyarakat di Kampung Wisata, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Indra Permana, S.H., M.H. selaku Lurah Mulyaharja yang mengatakan bahwa:

*"Secara umum, informasi yang berhubungan dengan kebijakan Kampung Wisata sudah dapat dipahami oleh seluruh masyarakat. Informasi ini telah disampaikan oleh pemerintah daerah melalui berbagai media, seperti sosialisasi media sosial, seminar, dan diskusi. Namun, masih ada beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya memahami informasi tersebut."* (21 Desember 2023)

**c. Wewenang**

Perintah yang diberikan umumnya berfungsi sebagai legitimasi bagi pelaksana untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 556/Kep.97-Disparbud/2022.

Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana yang dikatakan Pejabat fungsional Aditama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Koordinator di Bidang Desnitasi Wisata Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembinaan dan pengarahan kepada anggota KOMPEPAR agar sesuai dengan tujuan organisasi;
- 2) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap laporan kegiatan KOMPEPAR setiap tahunnya; dan
- 3) melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap KOMPEPAR meliputi kelembagaan, pendampingan, fasilitasi TDUP, Peningkatan mutu produk wisata pedesaan, peningkatan keterampilan tenaga kerja pariwisata, teknik pemasaran/promosi, sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta penghargaan bagi pengelola daya tarik wisata berprestasi.

Kewenangan Lurah di lokasi Kampung Wisata adalah sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan masyarakat khususnya warga yang berada di lingkungan kampung wisata, agar memiliki kesadaran dalam hal kepariwisataan salah satu caranya adalah dengan membentuk KOMPEPAR Kelurahan;
- 2) Membina para UMKM dengan mengembangkan produk unggulannya, dan memotivasi

- untuk selalu menciptakan inovasi-inovasi dalam mendukung Kampung Wisata;
- 3) Melakukan monitoring secara berkala ke tempat Kampung Wisata.

Sedangkan kewenangan Kompepar adalah memimpin kelompok sadar wisata, memberikan arahan kepada anggota, mengkoordinir kegiatan-kegiatan serta bertanggungjawab mengenai pelaksanaan kegiatan.

#### d. Fasilitas

Fasilitas adalah elemen pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun implementor mungkin memiliki staf yang kompeten, tanpa didukung oleh fasilitas (sarana dan prasarana) yang memadai, pelaksanaan kebijakan tersebut akan terhambat.

Berdasarkan rangkuman wawancara dan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa fasilitas di Kampung Wisata secara umum belum memadai.

#### 3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar

instansi bagi keberhasilan suatu program.

Dampak ekonomi dan sosial pelaksanaan kebijakan Implementasi Kebijakan Kampung Wisata di Kota Bogor sangat positif. Dampak positif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara ekonomi dapat membuka lapangan pekerjaan baru, peningkatan pendapatan masyarakat yang akhirnya dapat membantu meningkatkan kesejahterannya.
2. Secara sosial meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan seperti menjaga kebersihan, menambah pengetahuan tentang pola makan yang sehat dan meningkatkan interaksi sosial, meningkatkan kreatifitas anak-anak mudanya.

4. Komunikasi antar Organisasi

Komunikasi sangat penting untuk menciptakan kegiatan yang baik. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan secara efektif, Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) menyatakan bahwa tujuan kebijakan harus dipahami oleh para pelaksana. Komunikasi dalam penyampaian informasi kepada pelaksana kebijakan mengenai standar dan tujuan harus konsisten dan seragam, serta mencakup karakteristik para pengguna dari berbagai sumber informasi. Informasi yang diperoleh

harus akurat dan berasal dari sumber yang terpercaya. Untuk mengelola komunikasi yang baik, saluran komunikasi yang efektif harus dibangun dan dikembangkan. Semakin baik pengembangan saluran komunikasi yang dibangun, semakin tinggi peluang instruksi tersebut dapat diteruskan dengan tepat dan benar.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis komunikasi antar organisasi pada Implementasi Kebijakan Kampung Wisata di Kota Bogor sudah berjalan baik, sesuai pernyataan Pejabat fungsional Aditama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Koordinator di Bidang Desnitasi Wisata Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor bahwa:

*"Komunikasi antar instansi/lembaga yang terkait dengan kampung sudah terbangun dengan baik, melalui rapat koordinasi, forum formal maupun informal, dan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan Kampung Wisata. Adapun instansi/lembaga terkait kebijakan Kampung Wisata antara lain :*

- a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor
- b. Badan Perencanaan, Pengembangan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Bogor
- c. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor

- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor
- e. Dinas Perhubungan Kota Bogor
- f. Akademisi dari Perguruan Tinggi di Kota Bogor
- g. Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata (ASITA, PHRI, IHGMA, HPI)
- h. Forum Komunikasi POKDARWIS Kota Bogor

Komunikasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut di atas sudah dapat diterima dengan baik. Sejauh ini kami rasakan tidak ada hambatan dalam penyampaian komunikasi terkait kebijakan Kampung Wisata di Kota Boor.” (22 November 2023)

##### 5. Karakteristik Para Pelaksana

Karakteristik Badan Pelaksana adalah struktur formal dari organisasi dan atribut tidak formal anggotanya. Unsur yang memengaruhinya terdiri dari: kompetensi dan ukuran staf, tingkat pengawasan keputusan dan prosesnya, sumber politiknya, vitalitas, tingkat komunikasi terbuka, dan hubungan baik formal maupun non formal antara badan dengan pembuat keputusan (Amanda 2019).

Implementasi kebijakan Kampung Wisata di Kota Bogor dipengaruhi oleh variabel Karakteristik para pelaksana. Pada level Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah sangat jelas, sebagaimana yang dikatakan Pejabat

fungsional Aditama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Koordinator di Bidang Desnitasi Wisata Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor bahwa :

“Peran masing-masing instansi/lembaga yang terkait dalam Implementasi Kebijakan Kampung Wisata sudah sangat jelas, yaitu:

- a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor  
Mendorong masyarakat setempat untuk ikut serta mendirikan kelompok yang mengelola dan mengembangkan Kampung Wisata, serta melakukan peran pembinaan untuk meningkatkan kapasitas kompetensi kelompok masyarakat Kampung Wisata tersebut
- b. Forum Komunikasi POKDARWIS Kota Bogor  
Fasilitator komunikasi kelompok masyarakat untuk pengembangan Kampung Wisata dengan stakeholders terkait (pemerintah, industri pariwisata, akademisi, media, masyarakat lainnya)
- c. Akademisi dari Perguruan Tinggi di Kota Bogor  
Peran penelitian dan pengembangan kepariwisataan khususnya Kampung Wisata
- d. Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata (ASITA, PHRI, IHGMA, HPI)

*Peran pemasaran produk wisata yang dihasilkan oleh Kampung Wisata.*

Sedangkan pada level Kelurahan dan Kampung Wisata sendiri rincian pembagian tugas belum ada kejelasan yang dapat mengakibatkan hambatan dalam kebijakan Implementasi Kampung Wisata.

#### 6. Sikap Pelaksana

Situmorang menjelaskan bahwa Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa masalah kapasitas adalah salah satu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi bergantung pada kapabilitas pelaksana dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan (Amanda 2019).

Para pelaksana kebijakan harus memiliki komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan dan sikap demokratis. Para pelaksana harus memiliki sikap yang baik agar dapat menjalankan kebijakan dengan baik. Apabila para pelaksana kebijakan tidak memiliki sikap yang baik, maka kemungkinan proses kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien (Mansur 2021).

Dilihat dari bagaimana implementasi kebijakan Kampung Wisata di Kota Bogor dipengaruhi oleh variabel sikap pelaksana, para pelaksana sangat antusias dan

menyambut dengan baik adanya kebijakan kampung wisata. Sebagaimana yang dikatakan Bapak H. Napihudin, S.Pd. M.Si selaku Lurah Situgede bahwa:

*"Semua para pelaksana menyambut dengan baik dengan adanya kebijakan Kampung Wisata di Kota Bogor." (29 November 2023)*

Semua pelaksana menunjukkan sikap yang baik dan berkomitmen untuk melaksanakan program Implementasi Kebijakan Kampung Wisata ini dengan sebaik-baiknya, karena dampaknya sangat dirasakan sekali oleh masyarakat, terutama dampak ekonomi terhadap peningkatan pendapatan warga di sekitar kampung wisata.

#### **KESIMPULAN DA SARAN**

Berdasarkan teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn, bahwa ditemukan kebijakan Implementasi Kampung Wisata di Kota Bogor masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari segi Standa dan Tujuan Organisasi, Komunikasi Antar Organisasi, Sikap Para Pelaksana, Dampak Ekonomi dan sosial sudah baik dan perlu ditingkatkan lagi. Sedangkan dari segi Sumberdaya dan Karakteristik Pelaksana masih menghadapi tantangan.

Dari segi Sumberdaya dapat dikatakan belum optimal terutama dalam pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya sarana/fasilitas. Keterbatasan pegawai, baik di tingkat Dinas maupun di Kelurahan menjadi salah satu kekurangan dari sumberdaya manusia. Sedangkan di lokasi kampung wisata, kekurangan sumberdaya manusia lebih disebabkan kurangnya pengetahuan tentang pariwisata di lokasi kampung wisata. Sumberdaya sarana/fasilitas yang masih kurang, karena membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk pengembangan sarana/fasilitas ini. Oleh karena itu perlu mencari sumber tambahan dana alokasi untuk pengembangan sumberdaya kampung wisata, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya sarana/fasilitasnya.

Dari segi karakteristik para pelaksana masih belum adanya rincian pembagian tugas yang jelas terkait pelaksanaan kebijakan Implementasi Kebijakan Kampung Wisata di Kota Bogor bagi pengelola langsung di lapangan. Walaupun dalam level Dinas sudah sangat jelas pembagian tugas/peran dari masing-masing instansi/lembaga terkait. Oleh karena itu perlu membuat pembagian tugas

yang jelas bagi para pelaksana langsung di lapangan, agar pengelolaan kampung wisata lebih terarah dan dapat dirasakan manfaatnya secara menyeluruh oleh semua masyarakat di sekitar kampung wisata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. edited by P. Rapanna. Makasar.
- Amanda, Permatasari Iman. 2019. "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)." *TheJournalish: Social and Government* 1:34–38.
- Anon. n.d. "STRATEGI BISNIS PARIWISATA - Dr. Bachruddin Saleh Luturlean, S.E., M.M., Dkk - Google Books." Retrieved July 27, 2023 ([https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=BVi9DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=pengertian+pariwisata&ots=ByjnuB8NkR&sig=oBqHBeJEPwJ-NfNIFfdGphrZe7c&redir\\_esc=y#v=onepage&q=pengertianpariwisata&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=BVi9DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=pengertian+pariwisata&ots=ByjnuB8NkR&sig=oBqHBeJEPwJ-NfNIFfdGphrZe7c&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertianpariwisata&f=false)).
- Barlian, Eri. 2016. "Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6(August):128.
- Dewi, Dr. Dian Suluh Kusuma. 2022. *BUKU AJAR KEBIJAKAN PUBLIK*. 1st ed. edited by Y. Harsono and

- Desriyanti. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru Yogyakarta.
- Dewi, Helianthi, Occy Bonanza, Bedi Mulyana, Insan Kurnia, and Dyah Prabandari. 2023. "URBAN ECOTOURISM: TANTANGAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT KAMPUNG WISATA KOTA BOGOR [ Urban Ecotourism: Challenges in Increasing Community Participation in Tourism Village , Bogor City ]." 7(1).
- Febrianti, Anisa Cikal, Abubakar Iskandar, Magsiter Administrasi Publik, and Universitas Djuanda. 2023. "Infrastruktur Melalui Program Samisade Terhadap." 10:517–29.
- Isdarmanto. 2017. *Dasar Dasar Kepariwisata Dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*.
- Jamil, Imran, and Waskito Nugroho. 2023. "Model CSR Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Lokal Pada Program Kampung Wisata Tenun." *Learning Society: Jurnal CSR, Pendidikan, Dan Pemberdayaan Masyarakat* 4(1):230–43.
- Kasmad, Rulinawaty. 2019. "Studi Implementasi Kebijakan Publik." (September).
- Luthfie, Muhammad. 2021. *Kebijakan Publik Ruang Lingkup & Implementasi*. 1st ed. edited by M. Dzikri. Kota Bogor: 2021.
- Mansur, Jumria. 2021. "IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6 No. II:11.
- Mariyadi. n.d. "Kampung Wisata: Pengertian, Contoh, Dan Lokasinya." *Updesa.Com*. Retrieved (<https://updesa.com/kampung-wisata/>).
- MN Putri. 2016. 2.1.2. *Kriteria Desa/Kampung Wisata*.
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 6. 1st ed. edited by M. Albina. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Nugrahani, Farida. 2008. "Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa." 1(1):305.
- Nur, Askar, and Fakhira Yaumil Utami. 2022. "Proses Dan Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah Literature Review." *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya* 3(1):44–68. doi: 10.55623/AD.V3I1.109.
- Nurmayana Siregar. 2022. "Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pka)." *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial* 1(7):713–22.
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Satispi, Evi, and Kurniasih Mufidayaiti. 2019. *Buku Ajar Kebijakan Publik*

- 
- (*Teori Dan Aplikasinya*). 1st ed. edited by R. WD Tuti. Jakarta: UMJ Press Jakarta.
- Situmorang, Chazali H. 2016. *KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, ANALISIS, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN)*.
- Sudarsa, Agus Suarman. 2022. "Kebijakan Publik Dalam Perspektif Islam." *Unida.Ac.Id/Artikel*. Retrieved August 2, 2023 ([https://unida.ac.id/artikel/kebijakan-publik-dalam-perspektif-islam#:~:text=Tegasnya%2CKebijakan Publik yang sesuai,\(maqashid syari'ah\)\)](https://unida.ac.id/artikel/kebijakan-publik-dalam-perspektif-islam#:~:text=Tegasnya%2CKebijakan Publik yang sesuai,(maqashid syari'ah)))).
- Tisnawati, Endah, Dita Ayu Rani Natalia, Desrina Ratriningsih, Angling Randhiko Putro, Wiliarto Wirasmoyo, Henry P. Brotoatmodjo, and Adwiyah Asyifa'. 2019. "Strategi Pengembangan Eko-Wisata Berbasis Masyarakat Di Kampung Wisata Rejowinangun." *INERSIA: LNformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur* 15(1):1–11. doi: 10.21831/inersia.v15i1.24859.
- Uin, Ahmad Rijali, and Antasari Banjarmasin. 2019. "ANALISIS DATA KUALITATIF." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17(33):81–95. doi: 10.18592/ALHADHARAH.V17I33.2374.
- Widi, Shilvina. 2022. "Pendapatan Devisa Pariwisata Indonesia Melejit Pada 2022." *Dataindonesia.Id*.
- Zellatifanny, Cut Medika, and Bambang Mudjiyanto. 2018. "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi." *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi* 1(2):83–90. doi: 10.17933/diakom.v1i2.20.